

## | INVESTASI HULU MIGAS |

# ANGIN SEGAR DARI PETRONAS DAN BP

Bisnis, JAKARTA — Industri hulu minyak dan gas bumi nasional mendapatkan angin segar dari komitmen Petronas dan BP di tiga dari empat wilayah kerja yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lili Sunardi  
lili.sunardi@bisnis.com

**M**asuknya Petronas dan BP di wilayah kerja (WK) atau blok minyak dan gas bumi (migas) North Ketapang, Agung I dan Agung II dinilai sebagai keberhasilan pemerintah dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi di dalam negeri.

Moshe Rizal, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), mengatakan bahwa masuknya Petronas di WK North

Ketapang, serta BP di WK Agung I dan Agung II merupakan hal yang bagus. Alasannya, kedua perusahaan tersebut merupakan *national oil company* (NOC) dan *international oil company* (IOC) yang besar.

“Kita berharap seperti itu [bangkitnya kepercayaan perusahaan migas untuk meningkatkan investasinya], kita akan lihat realisasinya dalam tiga tahun ke depan,” katanya kepada *Bisnis*, Minggu (20/3).

Moshe pun berharap pemerintah terus memberikan dukungan bagi

perusahaan migas dalam merealisasikan investasinya di dalam negeri, khususnya saat melakukan kegiatan eksplorasi. “Tantangan yang akan dihadapi ada yang bersifat teknis maupun nonteknis, dan tahap eksplorasi selalu menjadi periode yang paling berisiko.”

Saat mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung WK migas tahap II 2021, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan bahwa *term*

and *condition* yang ditawarkan pemerintah kali ini mendapat sambutan baik dari kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. “Kami mendapat *input* juga dari KKKS bahwa *term and condition* yang ditawarkan dalam lelang kali ini cukup menarik, dan istilah mereka itu sudah mantap. Kita bisa lihat di WK dengan risiko tinggi itu *split*-nya bisa sampai 50-50, dan kalau risikonya berkurang tentu bagian pemerintah akan lebih besar,” katanya.

Dia menuturkan, pemerintah akan berupaya memperbaiki iklim investasi di industri hulu migas nasional dan menawarkan 17 WK lain di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah mengantongi komitmen pasti investasi sebesar US\$14,14 juta dari Petronas, BP, dan Mitra Multi Karya dalam lelang itu. Selain itu, ada juga bonus tanda tangan senilai US\$1,2 juta yang diperoleh negara.

Rinciannya, Petronas melalui PC Ketapang II Ltd. akan melakukan studi G&G di WK North Ketapang dengan anggaran US\$1 juta, seismik 3D seluas 300 kilometer persegi senilai US\$6,39 juta, *multi-client uplift fee* dari seismik 3D seluas 262 kilometer persegi US\$750.000, dan bonus tanda tangan US\$500.000.

Di WK Agung I, BP melalui BP Exploration Indonesia Limited akan melakukan studi G&G dengan anggaran US\$500.000, seismik 2D seluas 2.000 kilometer persegi senilai US\$2 juta, dan bonus tanda tangan US\$100.000. Adapun di WK Agung II, BP melalui BP West Papua I Limited siap melakukan studi G&G senilai US\$500.000, seismik 2D seluas 2.000 kilometer persegi dengan nilai US\$1 juta, dan bonus tanda tangan US\$100.000.

Kemudian Mitra Multi Karya akan melakukan *workover* delapan sumur dengan anggaran US\$2 juta, dan bonus tanda tangan US\$500.000.

Tutuka menyebut, komitmen investasi dari ketiga perusahaan itu merupakan sinyal positif bagi investasi

“**Term and condition yang ditawarkan dalam lelang kali ini cukup menarik, dan istilah mereka [KKKS] itu sudah mantap.**”

hulu migas nasional di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

## DUKUNGAN PENUH

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh agar pengelolaan WK North Ketapang bisa berjalan lancar hingga menemukan cadangan baru.

Menurutnya, terpilihnya Petronas sebagai pengelola North Ketapang menunjukkan bahwa investasi hulu migas Indonesia masih menarik bagi investor kelas dunia.

“Petronas merupakan salah satu perusahaan migas besar di dunia. Dengan adanya tambahan investasi di Indonesia, mudah-mudahan hal ini mampu menarik investor-investor kelas dunia lain untuk dapat mengikuti jejak Petronas.”

Petronas Executive Vice President and Chief Executive Officer of Upstream Adif Zulkifli mengatakan, pihaknya sangat gembira dengan hasil lelang tersebut. Terlebih, WK North Ketapang terletak dekat dengan lokasi perusahaan menemukan cadangan minyak pada tahun lalu.

“Kami akan terus memperkuat usaha hulu migas kami untuk memberikan nilai dan kontribusi pada pengembangan industri energi di Indonesia. Sebagai mitra energi dan solusi yang progresif, Petronas berkomitmen untuk memberikan pasokan energi yang aman dan andal kepada Indonesia,” ujarnya.

Secara terpisah, BP melalui keterangan resminya menyebut WK Agung I dan II merupakan daerah yang belum dieksplorasi. Kedua WK tersebut dengan sumber gas yang cukup signifikan, mendekati permintaan gas yang terus meningkat.

“Penambahan Blok Agung I dan Agung II ke dalam portofolio kami mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis kami di Indonesia,” kata BP Regional President Asia Pacific Nader Zaki. ■

www.bca.co.id

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

## PENGUMUMAN

### JADWAL DAN TATA CARA

### PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) tanggal 17 Maret 2022, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai tahun buku 2021 sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 7 Desember 2021, sehingga sisa dividen tunai per saham untuk tahun buku 2021 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

#### A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	21 Maret 2022
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	25 Maret 2022 29 Maret 2022
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	28 Maret 2022 30 Maret 2022
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Record Date</i> )	29 Maret 2022
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	19 April 2022

#### B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 Maret 2022 pukul 16.00 WIB (*Record Date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 19 April 2022 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/*script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Record Date*.

Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.

- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 29 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa *Form DGT* asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2021, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan *Form DGT* asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

- Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)\* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)\*.

\*Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (*Record Date*).

- Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada *Record Date*. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke *Record Date* dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/*script*, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 21 Maret 2022  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
DIREKSI

## | TRANSISI ENERGI |

# Pertamina Optimalkan Geothermal

Bisnis, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) menasar optimalisasi panas bumi atau *geothermal* untuk mendukung program transisi energi yang terus didorong pemerintah.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa perseroan memainkan peran penting dalam memimpin transisi industri energi Indonesia dengan menargetkan bauran energi dan pengurangan emisi melalui target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih komprehensif sebesar 30% sebelum 2030.

Dia menjelaskan, Pertamina melakukan beberapa inisiatif strategis untuk mempercepat transisi energi, seperti meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi, pengembangan kilang hijau, pengembangan bioenergi, komersialisasi hidrogen, gasifikasi, serta inisiasi ekosistem baterai dan penyimpanan energi terintegrasi.

“Kami percaya bahwa sumber daya panas bumi Indonesia yang melimpah yang tersebar di cincin api dapat menjadi tulang punggung yang kuat untuk mempercepat transisi energi, yang sejalan dengan tujuan pemerintah

Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih,” katanya, Minggu (20/3).

Selain itu, Pertamina juga sejak tahun lalu telah membentuk Komite Keberlanjutan yang dipimpin Direktur Utama Pertamina. Komite tersebut menaruh perhatian besar terhadap isu-isu energi global, termasuk program transisi energi.

Selain itu, kata dia, Pertamina juga mendukung Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 yang telah memilih transisi energi sebagai salah satu prioritas utamanya. Sebagai bagian dari The Business 20 Task Force on Energy, Sustainability, and Climate, Pertamina memiliki prioritas yang sama dengan G20 Indonesia, yakni menjadi katalisator yang kuat untuk pemulihan hijau dan berjalan seiring dengan prinsip ketahanan energi, pemerataan energi, dan kelestarian lingkungan.

“Pertamina berkomitmen untuk dikenal tidak hanya sebagai pemain energi global, tetapi juga sebagai perusahaan yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, dan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik,” ucapnya. (Lili Sunardi)